



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

**DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2023**



***DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023***



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan. Renja Perubahan tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk periode terakhir dari masa jabatan Kepala Daerah sesuai rencana kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

Disusunnya Renja Perubahan Tahun 2023 ini juga merupakan solusi dari persoalan serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Renja ini, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Dokumen Renja Perubahan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Singaraja, 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;



I Nyoman Riang Pustaka, S.IP ✓
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750218 199311 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
BULELENG NOMOR:.....TAHUN....
TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	 8
2.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	 14
2.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	 15
2.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	 16
2.4. Implementasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah	 17
2.5. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/Kegiatan	 17



BAB III. RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun Berkenaan.....	19
3.2. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan.....	20
3.3. Matrix Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah ...	23
BAB V. PENUTUP	24



DAFTAR TABEL

Lampiran

Tabel 2.1. Tabel Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.2. Tabel Matrix Rancangan Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja adalah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan sebagai salah satu pendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan periode terakhir dari masa jabatan Kepala Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta menggambarkan kebutuhan dana untuk memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.

Pada prinsipnya penyusunan Renja Perubahan 2023 dilakukan melalui tahapan, yaitu: (1) Persiapan penyusunan Renja, (2) Penyusunan Rancangan Renja, (3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Penetapan Renja. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menyusun Rancangan Renja akhir ini mengacu pada Renstra RPD Dinas Tahun 2023-2026. Selanjutnya Renja Anggaran Perubahan Tahun 2023 ini menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan Tahun 2023 untuk mendukung perwujudan Sasaran Strategis Daerah Kabupaten Buleleng yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dalam urusan wajib kewenangan pemerintah daerah non-pelayanan dasar yaitu *urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* serta *urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Disamping itu, penyusunan Renja Perubahan tahun 2023 ini juga menjadi dasar estimasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023.



Renja Anggaran Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini disusun secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dalam penyusunan Renja Anggaran Perubahan 2023 ini telah dilakukan forum *interen* dalam lingkup dinas yaitu Kepala Perangkat Daerah selaku pelaksana kebijakan bersama dengan Sekretaris, para Kabid/Kasubag/Kasi selaku pelaksana teknis program, kegiatan dan sub-kegiatan, kemudian dilaksanakan Forum Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan mengundang Perangkat Daerah terkait, karena melalui forum ini bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektoral. Dengan demikian diharapkan Renja Perubahan Tahun 2023 yang dibuat ini akan mampu memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dalam menjalankan kegiatan serta untuk mendukung program serta sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Renja Anggaran Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan dalam rumah tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri



- Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
 30. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
 31. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 411.4/1219/BKB-PP/2013 tentang Pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender (ARG).



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Anggaran Perubahan tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dan merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan memuat prioritas pembangunan daerah yang direalisasikan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Bidang Pengarusutamaan gender dan Keluarga lembaga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD.



1.4. Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023 secara sistematika disajikan dan diuraikan setiap bab sebagai berikut :

- BAB I** Berisi uraian Latar Belakang, Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023;
- BAB II** Berisi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- BAB III** Berisi penjabaran Rencana Kerja dan kerangka pendanaan Perangkat Daerah;
- BAB IV** Penutup.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN BERKENAAN

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, hambatan permasalahan yang dihadapi serta jenis program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

Kinerja pelayanan yang merupakan ukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Salah satu permasalahan kependudukan di Bali saat ini adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang masih tinggi. Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat penduduk Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Bali mengalami penambahan sekitar 426,65 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 42,66 ribu setiap tahun. Tingginya LPP di Bali bukan hanya karena tingginya angka kelahiran, tetapi juga disebabkan tingginya angka imigrasi. Hal ini mestinya disikapi oleh Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan penyerasian mobilitas kependudukan, sehingga bisa bersama-sama merumuskan dan menahan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu langkah yang mesti gencar lagi dilaksanakan secara bersama-sama mengingat pembangunan keluarga sangat penting untuk penguatan karakter dari keluarga yang ada di Bali.

Mengacu data BPS Kabupaten Buleleng, jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai angka 791.813 jiwa. Jumlah itu meningkat



167.688 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tercatat pada sensus penduduk tahun 2010 lalu. Saat itu jumlah penduduk di Buleleng mencapai 624.125 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Buleleng mencapai 0,6 persen pada tahun 2021 lebih besar dari target LPP tahun 2021 sebesar 0,56 persen. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk itu ditengarai tak lepas dari kondisi pandemi covid-19. Sehingga banyak penduduk Buleleng yang memilih pulang kampung, sekaligus mengubah alamat domisili mereka.

2. Penurunan Angka Kelahiran dengan peningkatan Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan data diatas, ada peningkatan angka kelahiran total di Kabupaten Buleleng tahun 2021 dengan TFR sebesar 2,36 per 1.000 penduduk dibandingkan dengan target renstra pada tahun yang sama dengan TFR sebesar 2,21 per 1.000 penduduk. Bahwa proximity determinan dari kelahiran yang paling kuat adalah penggunaan kontrasepsi, namun beberapa indikator juga perlu dicermati bukan hanya melihat dari jumlah anak rata-rata ataupun penggunaan kontrasepsi saja, tapi juga bagaimana jarak kelahiran per satu anak dengan anak yang lain perlu di lakukan edukasi kepada masyarakat.

Rasio akseptor KB pada tahun 2021 sebesar 50,78% lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun yang sama sebesar 87,67%. Keikutsertaan akseptor KB dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendorong (pendidikan dan sosial ekonomi), faktor pemungkin (jumlah PLKB), dan faktor penguat (dukungan masyarakat atau perangkat desa). Tingkat pemahaman, pendidikan, dan kepedulian kepala desa, kepala adat, atau tokoh masyarakat terhadap program KB sangat di butuhkan untuk menunjang kesuksesan akseptor KB. Pendidikan masyarakat dan perangkat desa yang rendah berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam menjadi akseptor KB menjadi rendah.

Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami kehamilan, melahirkan atau keguguran. Sedangkan peserta KB Aktif adalah peserta KB yang mendapat pelayanan secara terus menerus tanpa terputus. Kesadaran akseptor terhadap pentingnya KB dapat meningkatkan status kepesertaan KB menjadi akseptor aktif. Jenis kontrasepsi yang digunakan meliputi: IUD,



MOP/MOW, Implant, Suntik, Pil dan Kondom/*Ovag.* Adapun Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun pada tahun 2021 sebesar 52,73% lebih rendah dari target renstra pada tahun 2021 sebesar 87,67%. Hal ini juga dapat menjadi indikator meningkatnya angka kelahiran dan LPP di Kabupaten Buleleng.

Peran perangkat desa atau tokoh masyarakat baik secara individu atau bersama-sama dengan instansi yang berkaitan dengan BKKBN adalah membentuk jajaran kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang program kesehatan dan KB. Perangkat desa atau tokoh masyarakat juga berperan dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan seperti kegiatan Posyandu, apotek desa, bidan desa, serta mendorong peningkatan pelayanan KB mandiri melalui pengadaan alat kontrasepsi secara swadaya masyarakat atau modal dari instansi terkait. Kepala desa atau tokoh masyarakat juga wajib memiliki inisiatif untuk mendorong terbentuknya pengetahuan tentang KB di luar sekolah. Melalui upaya tersebut, diharapkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB akan meningkat.

3. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia telah menetapkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Sejumlah regulasi internasional sudah diratifikasi oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen di



tingkat global. Norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya membangun kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta menegaskan bahwa setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktifitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar sehingga dapat merusak keseimbangan pembangunan.

Menurut data BPS Provinsi Bali Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian IDG Buleleng pada tingkat Provinsi Bali cukup baik sebesar 91,95 pada tahun 2020. Koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah di tingkat pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk menjawab berbagai permasalahan terkait kesenjangan gender.

4. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Ukuran dari peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak salah satunya bisa diukur melalui Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan petugas terlatih di unit layanan terpadu. Berdasarkan hasil laporan Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) /1.000 Tahun 2021 di Kabupaten Buleleng sebesar 0,052 per 1000 penduduk lebih rendah dari target yang ditentukan sebesar 0,060 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan di Kabupaten Buleleng sudah mengalami penurunan KDRT, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 0,039 per 1000 penduduk, kasus KDRT meningkat pada tahun 2021. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah bekerjasama dengan berbagai pihak guna melakukan langkah nyata dengan melakukan fasilitasi lewat jalur mediasi sampai dengan tindak lanjut ke Pengadilan.

Semua kasus yang dilaporkan sudah dapat ditangani/ditindaklanjuti bersama oleh pihak terkait dengan difasilitasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng sesuai dengan prosedur yang ada. Fasilitasi penanganan kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan (100%), Adapun cakupan realisasi



capaian layanan sudah mencapai 100% pada tahun 2021 meliputi: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (100%), Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100%), Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100%).

Keberadaan Anak harus dijaga untuk mempunyai rasa aman, tidak hanya pada segi fisik namun lebih bersifat psikis. Anak tidak boleh merasa takut kepada orang tua, namun justru menganggap orang tua sebagai orang yang paling mengerti dan memahami anak. Orang tua harus mempunyai ketulusiklasan, sehingga dapat memberi sejuta rasa aman bagi anak yang pada akhirnya dapat terwujud tumbuh kembang anak seperti yang diharapkan. Selain itu, Pemerintah juga gencar menjalankan Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022. Hal ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga dan kementerian terkait, seperti misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan *stakeholder* lainnya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah mengambil berbagai upaya guna melakukan upaya-upaya preferntif melalui pembentukan gugus tugas di tiap-tiap desa. Hal ini juga dipantau oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan Polres Buleleng. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir tindakan pengeksploitasian terhadap Anak yang secara tidak langsung akan menelantarkan kebutuhan akan pemenuhan terhadap hak-hak Anak. Penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.

Hasil evaluasi Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng yang dilakukan pada Triwulan II (akhir bulan Juni) tahun 2023 menunjukkan bahwa dari pagu DPA APBD Pergeseran II TA.2023 sebesar **Rp.17.783.900.662,00** terealisasi sebesar **Rp.5.386.970.517,00** atau **30,29%**, sedangkan realisasi fisiknya sebesar **50,52%** dan rata-rata capaian kinerja sebesar **40,44%**.



Adapun tingkat capaian program Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng pada Semester I akhir bulan Juni tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.707.867.102,00, realisasi keuangan sebesar Rp.2.832.651.827,00 atau 42,23% dengan tingkat capaian fisik sebesar 58,56%;
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.289.623.411,00 realisasi keuangan sebesar Rp.46.508.812,00 atau 16,06%, dengan tingkat capaian fisik sebesar 62,50%;
3. Program Perlindungan Perempuan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.132.846.339,00 realisasi keuangan sebesar Rp.51.602.640,00 atau 38,84%, dengan tingkat capaian fisik sebesar 41,67%;
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.27.846.339,00 realisasi keuangan sebesar Rp.10.314.069,00 atau 37,04%, dengan tingkat capaian fisik sebesar 50,00%;
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.91.947.548,00 realisasi keuangan sebesar Rp.20.189.080,00 atau 21,96%, dengan tingkat capaian fisik sebesar 50,00%;
6. Program Pemenuhan Hak Anak dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.44.743.059,00 realisasi keuangan sebesar Rp.17.119.934,00 atau 38,26%, dengan tingkat capaian fisik sebesar 66,67%;
7. Program Perlindungan Khusus Anak dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.56.971.556,00 realisasi keuangan sebesar Rp.23.551.380,00 atau 41,34%, dengan tingkat capaian fisik sebesar 50,00%;
8. Program Pengendalian Penduduk dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.089.630.328,00 realisasi keuangan sebesar Rp.664.237.074,00 atau 31,79%, dengan tingkat capaian fisik sebesar 43,75%;
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.4.139.108.980,00 realisasi keuangan sebesar Rp.689.491.701,00 atau 16,66%, dengan tingkat capaian fisik sebesar 52,02%;
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.4.203.316.000,00 realisasi keuangan sebesar



Rp.1.043.070.000,00 atau 24,82%, dengan tingkat capaian fisik sebesar 30,00%;

2.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total 7 kegiatan dengan 20 sub kegiatan, terdapat 3 sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Daerah, dari total 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Program Perlindungan Perempuan, dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
7. Program Perlindungan Khusus Anak dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
8. Program Pengendalian Penduduk dari total 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dari total 4 kegiatan dengan 13 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (KB) dari total 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 terdapat beberapa program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total 7 kegiatan dengan 20 sub kegiatan, tidak ada sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Daerah, dari total 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Program Perlindungan Perempuan, dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak ada sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak ada sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak ada sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
7. Program Perlindungan Khusus Anak dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
8. Program Pengendalian Penduduk dari total 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan, terdapat 2 sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dari total 4 kegiatan dengan 13 sub kegiatan, terdapat 3 sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (KB) dari total 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan, tidak ada sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 terdapat beberapa program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total 7 kegiatan dengan 20 sub kegiatan, terdapat 17 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Daerah, dari total 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, terdapat 2 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Program Perlindungan Perempuan, dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, tidak terdapat sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
7. Program Perlindungan Khusus Anak dari total 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
8. Program Pengendalian Penduduk dari total 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan, terdapat 2 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dari total 4 kegiatan dengan 13 sub kegiatan, terdapat 9 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (KB) dari total 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.4 Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat/mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II tahun 2023. Apabila pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang terhadap penurunan target kinerja menjadi lebih rendah atau sama dengan target tahun sebelumnya.

Dari evaluasi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tidak ada permasalahan atau kendala berarti yang dihadapi, hal ini terbukti dari hasil rekap pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai 30,36% dan realisasi fisik mencapai 50,52%, dengan rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik mencapai 40,44%

2.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.



- b. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
- c. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan penyesuaian terhadap indikator dan target kinerja menyesuaikan dengan pagu yang telah dibagikan/dialokasikan.

Evaluasi terhadap Hasil Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 (terlampir).



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun Berkenaan

Pada DPPA Pergeseran II Tahun Anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng melaksanakan 10 program dengan 20 kegiatan dan 47 sub kegiatan, dengan total nilai keseluruhan APBD pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebesar Rp.17.783.900.662,00 dan sampai dengan Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp.5.398.736.517,00 (30,36%), dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.16.740.759.740,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.4.676.329.487,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.11.704.430.253,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp.360.000.000,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp.1.043.140.922,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.823.278.921,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.220.000.000,00

Berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mengalami penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Silpa DAK tahun sebelumnya.

Adapun total alokasi anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp.19.874.810.518,36 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.19.005.960.518,36 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.4.410.353.996,36 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.14.235.606.522,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp.360.000.000,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp.868.850.000,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.856.850.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.12.000.000,00.



Berikut Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023 :

Tabel 3.1

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
BELANJA OPERASI	16.740.759.740,00	19.005.960.518,36	2.265.200.778,36
Belanja Pegawai	4.676.329.487,00	4.410.353.996,36	(265.975.490,64)
Belanja Barang dan Jasa	11.704.430.253,00	14.235.606.522,00	2.531.176.299,00
Belanja Hibah	360.000.000,00	360.000.000,00	-
BELANJA MODAL	1.043.140.922,00	868.850.000,00	(174.290.922,00)
Belanja Modal peralatan dan Mesin	823.278.921,00	856.850.000,00	33.571.079,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	12.000.000,00	(200.000.000,00)
Jumlah Belanja	17.783.900.662,00	19.874.810.518,36	2.090.909.856,36

3.2. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mengalami penyesuaian pagu anggaran sehingga berdampak terhadap beberapa kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, sehingga mesti disesuaikan kembali target capaian masing-masing kegiatan/Sub-Kegiatan..

Secara umum kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2023 mencakup 10 program dengan 20 kegiatan dan 47 sub kegiatan meliputi :



a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan kelancaran operasional kantor, dalam rangka memenuhi ketersediaan sarana prasana kantor dalam mendukung operasional dan pelayanan administrasi perkantoran. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) Tahun 2023 sebesar Rp.17.783.900.662,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.874.810.518,36.

b) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengarusutamaan dan pemberdayaan Perempuan guna menunjang pembangunan daerah. Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) sebesar Rp.289.623.411,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.289.623.411,00.

c) Program Perlindungan Perempuan

Program ini dilaksanakan dalam rangka Pencegahan dan pendampingan Perempuan korban kekerasan. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan, dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) sebesar Rp.132.846.339,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.153.246.339,00

d) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran serta anggota keluarga dalam peningkatan pendapatan keluarga. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) sebesar Rp.27.846.339,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.27.846.339,00.

e) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan data Gender dan Anak sebagai landasan pengambilan kebijakan dalam Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) sebesar



Rp.91.947.548,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.49.947.548,00.

f) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam mendukung capaian salah satu indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) sebesar Rp.44.743.059,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.743.059,00.

g) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak berkebutuhan khusus. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan, dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) sebesar Rp.56.971.556,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.47.771.556,00.

h) Program Pengendalian Penduduk

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan menyoar wilayah sasaran khusus (Kampung Berkualitas/KB). Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan, terdapat 2 sub kegiatan, dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) sebesar Rp.2.089.630.328,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.089.630.328,00.

i) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini dilaksanakan dalam rangka penekanan angka kelahiran melalui pelayanan KB serta percepatan penurunan angka *Stunting*. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan 13 sub kegiatan, terdapat 9 sub kegiatan, dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) sebesar Rp.4.139.108.980,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.574.435.861,00.

j) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini dilaksanakan dalam rangka Operasional pendampingan keluarga berisiko *stunting* dan sarpras BKB KIT *Stunting*. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan, dengan anggaran sebelum perubahan (Pergeseran II) sebesar Rp.4.203.316.000,00 sedangkan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.203.316.000,00.



3.3 Matrik Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Adapun kegiatan yang mengalami penambahan maupun pengurangan anggaran terlihat pada matrik Tabel 3.2 (terlampir).



BAB IV

PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Anggaran Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Selain itu, dengan ditetapkannya Renja APBD Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkaitan dengan pembangunan untuk dijadikan sebagai acuan dan arahan peran masing-masing dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Renja APBD Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Singaraja, 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;



I Nyoman Riang Pustaka, S.IP ✓

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19750218 199311 1 001



LAMPIRAN

TABEL 2-1

Evaluasi terhadap Hasil Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun lalu (n-1) tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=(13/9*100)	16=(14/10*100)	17=(7+13)	18=(8+14)	19=(17/5*100)	20=(18/6*100)	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	6.150.000.000	100,00%	6.945.234.200	100,00%	6.707.867.102	58,56%	2.832.651.827	58,56%	42,23%	58,56%	2.832.651.827	58,56%	46,06%	DP2KBP3A
1.1	2.08.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan disusun dan hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti	13 Dok.	300.000.000	13 Dok.	222.578.000	13 Dok.	122.930.700	6 Dok.	47.043.000	46,15%	38,27%	6 Dok.	47.043.000	46,15%	15,68%	
1.1.1	2.08.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok.	125.000.000	5 Dok.	103.420.000	6 Dok.	77.068.800	4 Lap.	31.362.000	80,00%	40,69%	4 Lap.	31.362.000	66,67%	25,09%	
1.1.2	2.08.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Lap.	175.000.000	7 Lap.	119.158.000	7 Lap.	45.861.900	5 Dok.	15.681.000	71,43%	34,19%	5 Dok.	15.681.000	71,43%	8,96%	
1.2	2.08.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja keuangan disusun tepat waktu	12 Dok.	3.813.450.900	12 Dok.	4.226.119.291	12 Dok.	4.862.983.643	6 Dok.	2.303.950.206	100,00%	47,38%	6 Dok.	2.303.950.206	50,00%	60,42%	
1.2.1	2.08.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bln.	3.575.450.900	28 Orang/ Bln.	4.014.956.909	25 Orang/ Bln.	4.676.329.487	25 Orang/ Bln.	2.226.177.646	100,00%	47,61%	25 Orang/ Bln.	2.226.177.646	83,33%	62,26%	
1.2.2	2.08.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dok.	238.000.000	6 Dok.	211.162.382	6 Dok.	186.654.156	4 Dok.	77.772.560	66,67%	41,67%	4 Dok.	77.772.560	66,67%	32,68%	
1.3	2.08.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	49.000.000	100,00%	-	100,00%	9.145.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.3.1	2.08.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	26.000.000	-	-	30 Paket	9.145.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.3.2	2.08.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	23.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.4	2.08.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	413.600.000	100,00%	331.657.171	100,00%	374.796.025	75,00%	117.009.490	75,00%	31,22%	75,00%	117.009.490	75,00%	28,29%	
1.4.1	2.08.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.600.000	2 Paket	2.624.900	4 Paket	10.571.400	4 Paket	-	100,00%	0,00%	4 Paket	-	66,67%	0,00%	
1.4.2	2.08.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	116.000.000	2 Paket	102.987.000	3 Paket	84.768.483	2 Paket	26.603.530	66,67%	31,38%	2 Paket	26.603.530	28,57%	22,93%	

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun lalu (n-1) tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=(13/9*100)	16=(14/10*100)	17=(7+13)	18=(8+14)	19=(17/5*100)	20=(18/6*100)	21
1.4.3	2.08.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	199.000.000	9 Paket	168.937.498	9 Paket	170.177.316	9 Paket	73.124.060	100,00%	42,97%	9 Paket	73.124.060	90,00%	36,75%	
1.4.4	2.08.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	17.000.000	1 Paket	8.461.373	4 Paket	76.589.626	1 Paket	1.956.300	25,00%	2,55%	1 Paket	1.956.300	20,00%	11,51%	
1.4.5	2.08.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok.	12.000.000	3 Dok.	8.760.000	3 Dok.	8.760.000	3 Dok.	2.172.000	100,00%	24,79%	3 Dok.	2.172.000	100,00%	18,10%	
1.4.6	2.08.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Lap.	24.000.000	12 Lap.	21.181.400	12 Lap.	7.929.200	10 Lap.	3.953.600	83,33%	49,86%	10 Lap.	3.953.600	83,33%	16,47%	
1.4.7	2.08.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap.	40.000.000	44 Lap.	18.705.000	12 Lap.	16.000.000	6 Lap.	9.200.000	66,67%	57,50%	6 Lap.	9.200.000	15,00%	23,00%	
1.5	2.08.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	56 Unit	496.300.000	25 Unit	660.000.000	55 Unit	642.444.502	50 Unit	60.031.379	90,91%	9,34%	50 Unit	60.031.379	89,29%	12,10%	
1.5.1	2.08.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	317.000.000	5 Unit	660.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.5.2	2.08.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	17.000.000	-	-	111 Unit	96.345.423	102 Unit	-	91,89%	0,00%	102 Unit	-	408,00%	0,00%	
1.5.3	2.08.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	33.500.000	-	-	12 Unit	134.226.000	12 Unit	11.000.000	100,00%	8,20%	12 Unit	11.000.000	400,00%	32,84%	
1.5.4	2.08.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	111.000.000	-	-	1 Unit	220.000.000	1 Unit	11.766.000	100,00%	5,35%	1 Unit	11.766.000	100,00%	10,60%	
1.5.5	2.08.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17.800.000	-	-	10 Unit	191.873.079	10 Unit	37.265.379	100,00%	19,42%	10 Unit	37.265.379	58,82%	209,36%	
1.6	2.08.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12 Lap.	768.100.000	12 Lap.	1.199.629.888	12 Lap.	525.001.907	6 Lap.	219.304.896	50,00%	41,77%	6 Lap.	219.304.896	50,00%	28,55%	
1.6.1	2.08.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap.	106.000.000	12 Lap.	90.707.120	12 Lap.	129.579.854	6 Lap.	53.991.600	50,00%	41,67%	6 Lap.	53.991.600	50,00%	50,94%	
1.6.2	2.08.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	172.000.000	12 Lap.	137.791.500	12 Lap.	69.599.500	6 Lap.	32.219.756	50,00%	46,29%	6 Lap.	32.219.756	50,00%	18,73%	
1.6.3	2.08.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap.	490.100.000	12 Lap.	465.685.449	12 Lap.	325.822.553	6 Lap.	133.093.540	50,00%	40,85%	6 Lap.	133.093.540	50,00%	27,16%	

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun lalu (n-1) tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=(13/9*100)	16=(14/10*100)	17=(7+13)	18=(8+14)	19=(17/5*100)	20=(18/6*100)	21
1.6.4	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor disediakan, Jumlah kantor yang dibersihkan			6 Jenis	505.445.819	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.7	2.08.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	175 Unit	309.549.100	120 Unit	305.249.850	171 Unit	170.565.325	93 Unit	85.312.856	54,39%	50,02%	93 Unit	85.312.856	53,14%	27,56%	
1.7.1	2.08.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	265.000.000	161 Unit	221.480.800	183 Unit	170.565.325	93 Unit	85.312.856	50,82%	50,02%	93 Unit	85.312.856	56,36%	32,19%	
1.7.2	2.08.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	44.549.100	10 Unit	83.769.050	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas	83,11%	300.000.000	85%	393.685.200	72,97%	289.623.411	62,50%	46.508.812	85,65%	16,06%	62,50%	46.508.812	75,20%	15,50%	
2.1	2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jejaring pengarusutamaan gender yang aktif	100,00%	85.000.000	95%	61.956.800	100,00%	52.702.901	75,00%	22.026.584	75,00%	41,79%	75,00%	22.026.584	75,00%	25,91%	
2.1.1	2.08.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok.	37.000.000	1 Dok.	44.556.800	1 Dok.	30.546.339	1 Dok.	11.602.640	100,00%	37,98%	1 Dok.	11.602.640	100,00%	31,36%	
2.1.2	2.08.02.2.01.04	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	39 Perangkat Daerah	48.000.000	45 Perangkat Daerah	17.400.000	40 Perangkat Daerah	22.156.562	40 Perangkat Daerah	10.423.944	100,00%	47,05%	40 Perangkat Daerah	10.423.944	102,56%	21,72%	

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun lalu (n-1) tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=(13/9*100)	16=(14/10*100)	17=(7+13)	18=(8+14)	19=(17/5*100)	20=(18/6*100)	21
2.2	2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan	75,00%	215.000.000	90,00%	331.728.400	70,00%	236.920.510	50,00%	24.482.228	71,43%	10,33%	50,00%	24.482.228	66,67%	11,39%	
2.2.1	2.08.02.2.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok.	215.000.000	2 Dok.	331.728.400	2 Dok.	236.920.510	1 Dok.	24.482.228	50,00%	10,33%	1 Dok.	24.482.228	50,00%	11,39%	
3	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	82,00%	55.000.000	19,60%	31.500.000	80,00%	27.846.339	50,00%	10.314.069	62,50%	37,04%	50,00%	10.314.069	60,98%	18,75%	
3.1	2.08.04.2.01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	60,00%	55.000.000	80,00%	31.500.000	54,00%	27.846.339	50,00%	10.314.069	92,59%	37,04%	50,00%	10.314.069	83,33%	18,75%	
3.1.1	2.08.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	5 Lap.	55.000.000	4 Lap.	31.500.000	1 Lap.	27.846.339	1 Lap.	10.314.069	100,00%	37,04%	1 Lap.	10.314.069	20,00%	18,75%	
4	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase kualitas Data Gender dan Anak pada Instansi Pemerintah	85,00%	45.000.000	100,00%	46.185.200	80,00%	91.947.548	50,00%	20.189.080	62,50%	21,96%	50,00%	20.189.080	58,82%	44,86%	
4.1	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender pada instansi Pemerintah	85,00%	45.000.000	100,00%	46.185.200	80,00%	91.947.548	50,00%	20.189.080	62,50%	21,96%	50,00%	20.189.080	58,82%	44,86%	
4.1.1	2.08.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dok.	45.000.000	12 Dok.	46.185.200	12 Dok.	91.947.548	6 Dok.	20.189.080	50,00%	21,96%	6 Dok.	20.189.080	50,00%	44,86%	
5	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan	100,00%	122.062.904	100,00%	185.882.200	100,00%	132.846.339	100,00%	51.602.640	100,00%	38,84%	100,00%	51.602.640	100,00%	42,28%	

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun lalu (n-1) tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=(13/9*100)	16=(14/10*100)	17=(7+13)	18=(8+14)	19=(17/5*100)	20=(18/6*100)	21
5.1	2.08.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	100,00%	56.762.904	100,00%	119.905.000	100,00%	132.846.339	100,00%	51.602.640	100,00%	38,84%	100,00%	51.602.640	100,00%	90,91%	
5.1.1	2.08.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dok.	56.762.904	12 Dok.	119.905.000	12 Dok.	132.846.339	5 Dok.	51.602.640	41,67%	38,84%	5 Dok.	51.602.640	41,67%	90,91%	
5.2	2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100,00%	65.300.000	100,00%	65.977.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.2.1	2.08.03.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Layanan	65.300.000	21 Layanan	65.977.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	MADYA	55.000.000	PRATAMA	31.728.400	PRATAMA	44.743.059	PRATAMA	17.119.934	100,00%	38,26%	PRATAMA	17.119.934	0,00%	31,13%	
6.1	2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa layak anak yang menerapkan PATBM dan jejaring P2TP2A	45,00%	55.000.000	30,00%	31.728.400	30,00%	44.743.059	30,00%	17.119.934	100,00%	38,26%	30,00%	17.119.934	66,67%	31,13%	
6.1.1	2.08.06.2.02.04	Sub Kegiatan Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dok.	55.000.000	12 Dok.	31.728.400	12 Dok.	44.743.059	8 Dok.	17.119.934	66,67%	38,26%	8 Dok.	17.119.934	66,67%	31,13%	
7	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan	100,00%	60.156.518	100,00%	151.379.350	100,00%	56.971.556	100,00%	23.551.380	100,00%	41,34%	100,00%	23.551.380	100,00%	39,15%	

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun lalu (n-1) tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=(13/9*100)	16=(14/10*100)	17=(7+13)	18=(8+14)	19=(17/5*100)	20=(18/6*100)	21
8.1.5	2.08.07.2.01.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dok.	45.000.000	-	-	12 Dok.	1.601.343.720	6 Dok.	503.574.038	50,00%	31,45%	6 Dok.	503.574.038	50,00%	1119,05%	
9	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Angka Kelah	2,06	5.000.000.000	2,12	4.909.932.049	2,09	4.139.108.980	3,06	689.491.701	68,30	16,66%	3,06	689.491.701	67,32	13,79%	
9.1	2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS Peserta KB	80,00%	629.000.000	88,00%	52.456.800	70,00%	836.358.980	70,00%	301.625.796	100,00%	36,06%	70,00%	301.625.796	87,50%	47,95%	
9.1.1	2.14.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	133 Organisasi	63.000.000	-	-	125 Organisasi	79.968.000	83 Organisasi	37.400.000	66,40%	46,77%	83 Organisasi	37.400.000	62,41%	59,37%	
9.1.2	2.14.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1 Dok.	85.000.000	746 Orang	52.456.800	1 Dok.	170.690.980	1 Dok.	58.013.200	100,00%	33,99%	1 Dok.	58.013.200	100,00%	68,25%	
9.1.3	2.14.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa	1 Dok.	66.000.000	-	-	1 Dok.	150.034.000	1 Dok.	49.455.596	100,00%	32,96%	1 Dok.	49.455.596	100,00%	74,93%	
9.1.4	2.14.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Lap.	125.000.000	-	-	12 Lap.	159.300.000	5 Lap.	57.600.000	41,67%	36,16%	5 Lap.	57.600.000	41,67%	46,08%	
9.1.5	2.14.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Lap.	225.000.000	-	-	9 Lap.	238.950.000	9 Lap.	91.137.000	100,00%	38,14%	9 Lap.	91.137.000	100,00%	40,51%	

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun lalu (n-1) tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=(13/9*100)	16=(14/10*100)	17=(7+13)	18=(8+14)	19=(17/5*100)	20=(18/6*100)	21
9.1.6	2.14.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Lap.	65.000.000	-	-	12 Lap.	37.416.000	5 Lap.	8.020.000	41,67%	21,43%	5 Lap.	8.020.000	41,67%	12,34%	
9.2	2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1/1	3.110.000.000	1/1	3.027.268.789	1/1	503.550.000	1/1	-	100,00%	0,00%	1/1	-	100,00%	0,00%	
9.2.1	2.14.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	500 Orang	3.110.000.000	600 Orang	3.027.268.789	10360 Orang	503.550.000	1095 Orang	-	10,57%	0,00%	1095 Orang	-	219,00%	0,00%	
9.3	2.14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00%	933.000.000	100,00%	1.337.358.890	100,00%	2.216.700.000	100,00%	209.625.905	100,00%	9,46%	100,00%	209.625.905	100,00%	22,47%	
9.3.1	2.14.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Lap.	85.000.000	-	-	12 Lap.	33.188.000	6 Lap.	6.616.600	50,00%	19,94%	6 Lap.	6.616.600	50,00%	7,78%	
9.3.2	2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.350 Orang	758.000.000	-	-	3580 Orang	1.513.269.000	1909 Orang	168.033.305	53,32%	11,10%	1909 Orang	168.033.305	141,41%	22,17%	
9.3.3	2.14.03.2.03.05	Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah laporan kebutuhan dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) tersusun	12 Lap.	178.536.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
9.3.4	2.14.03.2.03.06	Sub-Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	18 Unit	598.387.000	-	-	18 Unit	598.387.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
9.3.5	2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58 Lap.	90.000.000	-	-	50 Lap.	71.856.000	5 Lap.	34.976.000	10,00%	48,68%	5 Lap.	34.976.000	8,62%	38,86%	
9.3.6	2.14.03.2.03.09	Sub-Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah remaja yang meningkat pemahamannya tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	200 Orang	37.741.090	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun lalu (n-1) tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=(13/9*100)	16=(14/10*100)	17=(7+13)	18=(8+14)	19=(17/5*100)	20=(18/6*100)	21
9.3.7	2.14.03.2.03.11	Sub-Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor yang mendapatkan pelayanan Kb gratis			1.000 Orang	1.121.081.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
9.4	2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pembentukan Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	50,00%	328.000.000	25,00%	492.847.570	30,00%	582.500.000	30,00%	178.240.000	100,00%	30,60%	30,00%	178.240.000	60,00%	54,34%	
9.4.1	2.14.03.2.04.02	Sub-Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-			12 Dok	9.370.000	1 Dok	3.400.000	100,00%	36,29%	1 Dok	3.400.000	0,00%	0,00%	
9.4.2	2.14.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	37 Kampung	328.000.000	37 Kampung	458.168.100	37 Kampung	573.130.000	37 Kampung	174.840.000	100,00%	30,51%	37 Kampung	174.840.000	100,00%	53,30%	
9.4.3	2.14.03.2.04.04	Sub-Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah stakeholder yang meningkat pemahamannya tentang program terpadu Kampung KB			80 Orang	34.679.470	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
10	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan)	72,00%	4.300.000.000	65,15%	4.371.662.400	66,50%	4.203.316.000	65,00%	1.043.070.000	72,00%	24,82%	65,00%	1.043.070.000	90,28%	24,26%	
10.1	2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKA Aktif	70,50%	4.300.000.000	65,15%	4.371.662.400	65,00%	4.203.316.000	65,00%	1.043.070.000	72,00%	24,82%	65,00%	1.043.070.000	92,20%	24,26%	
10.1.1	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					20 Unit	360.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun lalu (n-1) tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15=(13/9*100)	16=(14/10*100)	17=(7+13)	18=(8+14)	19=(17/5*100)	20=(18/6*100)	21
10.1.2	2.14.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3000 Orang	4.300.000.000	250 Orang	4.371.662.400	3660 Orang	3.843.316.000	2196 Orang	1.043.070.000	60,00%	27,14%	2196 Orang	1.043.070.000	73,20%	24,26%	
T O T A L				100,00%	16.162.219.422	100%	17.114.969.469	100%	17.783.900.662	77,83%	5.398.736.517	77,83%	30,36%	77,83%	5.398.736.517	77,83%	33,40%	

Tabel 3.2
Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD Perubahan Tahun 2023												Catatan Penting
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Pagu Induk (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota													
2.08.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
2.08.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	Jumlah dokumen perencanaan disusun dan hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti	13 Dok.	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	77.068.800	77.068.800	-	-
2.08.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Lap.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	Jumlah dokumen perencanaan disusun dan hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti	13 Dok.	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	45.861.900	45.861.900	-	-
2.08.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2.08.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bln.	Terlaksananya penyusunan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Jumlah dokumen pelaporan kinerja keuangan disusun tepat waktu	12 Dok.	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	4.676.329.487	4.410.353.996,36	(265.975.490,64)	-
2.08.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dok.	Terlaksananya penyusunan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Jumlah dokumen pelaporan kinerja keuangan disusun tepat waktu	12 Dok.	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	186.654.156	186.654.156	-	-
2.08.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
2.08.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Terlaksananya administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Jumlah dokumen pelaporan kinerja keuangan disusun tepat waktu	12 Dok.	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	9.145.000	-	(9.145.000)	-
2.08.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2.08.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	10.571.400	10.571.400	-	-
2.08.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	84.768.483	88.428.483	3.660.000	-
2.08.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	170.177.316	183.677.316	13.500.000	-

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD Perubahan Tahun 2023												Catatan Penting
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Pagu Induk (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target					
2.08.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	76.589.626	77.849.626	1.260.000	-
2.08.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok.	Terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	8.760.000	8.760.000	-	-
2.08.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	Terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	7.929.200	7.929.200	-	-
2.08.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap.	Terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	16.000.000	32.040.000	16.040.000	-
2.08.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2.08.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	111 Unit	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerinta Daerah	100%	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	55 Unit	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	96.345.423	99.304.501	2.959.078	-
2.08.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerinta Daerah	100%	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	55 Unit	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	134.226.000	164.976.000	30.750.000	-
2.08.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerinta Daerah	100%	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	55 Unit	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	220.000.000	12.000.000	(208.000.000)	-
2.08.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerinta Daerah	100%	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	55 Unit	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	191.873.079	205.320.561	13.447.482	-
2.08.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
2.08.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12 Lap.	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	129.579.854	129.579.854	-	-
2.08.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12 Lap.	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	69.599.500	69.599.500	-	-

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD Perubahan Tahun 2023											Catatan Penting	
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Pagu Induk (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)		Tambah/(Kurang)
		Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target					
2.08.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap.	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12 Lap.	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	325.822.553	357.812.753	31.990.200,00	-
2.08.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2.08.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	183 Unit	Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tgas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	171 Unit	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	170.565.325	226.462.031	55.896.706	-
2.08.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100,00%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tgas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	171 Unit	Kab. Buleleng, Kec. Buleleng, Kel. Banyuasri	-	-	-	-
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan													
2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota													
2.08.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas	72,97%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok.	Meningkatnya jejaring pengarusutamaan gender yang aktif	100%	Persentase jejaring pengarusutamaan gender yang aktif	100,00%	Kab.Buleleng,	30.546.339	30.546.339	-	-
2.08.02.2.01.04	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas	72,97%	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Perangkat Daerah	Meningkatnya jejaring pengarusutamaan gender yang aktif	100%	Persentase jejaring pengarusutamaan gender yang aktif	100,00%	Kab.Buleleng,	22.156.562	22.156.562	-	-
2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
2.08.02.2.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas	72,97%	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok.	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan Perempuan	100%	Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan		Kab.Buleleng,	236.920.510	236.920.510	-	-
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga													
2.08.04.2.01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD Perubahan Tahun 2023												Catatan Penting
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Pagu Induk (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target					
2.08.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	80,00%	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap.	Meningkatnya Desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	54,00%	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	54,00%	Kab.Buleleng,	27.846.339	27.846.339	-	-
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak													
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
2.08.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Data Gender dan Anak pada Instansi Pemerintah	80,00%	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dok.	Meningkatnya penerapan Data Gender pada Instansi Pemerintah	100,00%	Persentase Data Gender pada instansi Pemerintah	80,00%	Kab.Buleleng,	91.947.548	49.947.548	(42.000.000)	-
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan													
2.08.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
2.08.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan	100,00%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dok.	Terjaminnya layanan pendampingan bagi Perempuan korban kekerasan	100,00%	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	100,00%	Kab.Buleleng,	132.846.339	153.246.339	20.400.000	-
2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota													
2.08.03.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Persentase perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan	100,00%	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Terjaminnya layanan rujukan bagi Perempuan korban kekerasan	100,00%	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	-	Kab.Buleleng,	-	-	-	-
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)													
2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
2.08.06.2.02.04	Sub Kegiatan Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kategori Kabupaten Layak Anak	PRATAMA	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dok.	Meningkatnya Desa Layak Anak yang Menerapkan PATBM dan jejaring P2TP2A	30,00%	Persentase desa layak anak yang menerapkan PATBM dan jejaring P2TP2A	30,00%	Kab.Buleleng,	44.743.059	44.743.059	-	-
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak													
2.08.07.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
2.08.07.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan	100,00%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dok.	Terjaminnya layanan pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan	100,00%	Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	100,00%	Kab.Buleleng,	56.971.556	47.771.556	(9.200.000)	-
2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota													

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD Perubahan Tahun 2023												Catatan Penting
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Pagu Induk (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target					
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan	100,00%	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Terjaminnya layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100,00%	Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	-	Kab.Buleleng,	-	-	-	-
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk													
2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
2.08.07.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase Kampung Berkualitas (KB) di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	27,98%	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Dok.	Tersedianya informasi data micro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100,00%	Cakupan informasi data micro keluarga di setiap desa/ kelurahan	100,00%	Kab.Buleleng,	118.200.000	118.200.000	-	-
2.08.07.2.01.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase Kampung Berkualitas (KB) di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	27,98%	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	12 Dok.	Tersedianya informasi data micro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100,00%	Cakupan informasi data micro keluarga di setiap desa/ kelurahan	100,00%	Kab.Buleleng,	197.270.608	197.270.608	-	-
2.08.07.2.01.12	Sub-Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase Kampung Berkualitas (KB) di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	27,98%	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Dok.	Tersedianya informasi data micro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100,00%	Cakupan informasi data micro keluarga di setiap desa/ kelurahan	100,00%	Kab.Buleleng,	172.816.000	172.816.000	-	-
2.08.07.2.01.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase Kampung Berkualitas (KB) di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	27,98%	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dok.	Tersedianya informasi data micro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100,00%	Cakupan informasi data micro keluarga di setiap desa/ kelurahan	100,00%	Kab.Buleleng,	1.601.343.720	1.601.343.720	-	-
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)													
2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal													
2.14.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	125 Organisasi	Meningkatnya capaian PUS peserta KB	70,00%	Persentase PUS Peserta KB	70,00%	Kab.Buleleng,	79.968.000	263.568.000	183.600.000	-
2.14.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dok.	Meningkatnya capaian PUS peserta KB	70,00%	Persentase PUS Peserta KB	70,00%	Kab.Buleleng,	170.690.980	170.690.980	-	-

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD Perubahan Tahun 2023												Catatan Penting
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Pagu Induk (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target					
2.14.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dok.	Meningkatnya capaian PUS peserta KB	70,00%	Persentase PUS Peserta KB	70,00%	Kab.Buleleng,	150.034.000	351.435.381	201.401.381	-
2.14.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Lap.	Meningkatnya capaian PUS peserta KB	70,00%	Persentase PUS Peserta KB	70,00%	Kab.Buleleng,	159.300.000	477.900.000	318.600.000	-
2.14.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Lap.	Meningkatnya capaian PUS peserta KB	70,00%	Persentase PUS Peserta KB	70,00%	Kab.Buleleng,	238.950.000	484.245.500	245.295.500	-
2.14.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Lap.	Meningkatnya capaian PUS peserta KB	70,00%	Persentase PUS Peserta KB	70,00%	Kab.Buleleng,	37.416.000	352.716.000	315.300.000	-
2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													
2.14.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	10360 Orang			Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1/1	Kab.Buleleng,	503.550.000	671.400.000	167.850.000	-
2.14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
2.14.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Lap.	Terpenuhinya ketersediaan dan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00%	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00%	Kab.Buleleng,	33.188.000	98.988.000	65.800.000	-
2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3580 Orang	Terpenuhinya ketersediaan dan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00%	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00%	Kab.Buleleng,	1.513.269.000	2.121.053.000	607.784.000	-

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD Perubahan Tahun 2023												Catatan Penting
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Pagu Induk (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Tambah/(Kurang)	
		Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target					
2.14.03.2.03.06	Sub-Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	18 Unit	Terpenuhnya ketersediaan dan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00%	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00%	Kab.Buleleng,	598.387.000	598.387.000	-	-
2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50 Lap.	Terpenuhnya ketersediaan dan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00%	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00%	Kab.Buleleng,	71.856.000	112.032.000	40.176.000	-
2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04.02	Sub-Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dok	Terbentuknya Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	27,98%	Persentase pembentukan Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	30,00%	Kab.Buleleng,	9.370.000	9.370.000	-	-
2.14.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,09	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	37 Kampung	Terbentuknya Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	27,98%	Persentase pembentukan Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	30,00%	Kab.Buleleng,	573.130.000	862.650.000	289.520.000	-
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)													
2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga Sejahtera Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan)	66,50%	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	Meningkatnya PUS anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKA Aktif	65,00%	Persentase PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKA Aktif	65,00%	Kab.Buleleng,	360.000.000	360.000.000	-	-
2.14.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga Sejahtera Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan)	66,50%	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3660 Orang	Meningkatnya PUS anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKA Aktif	65,00%	Persentase PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKA Aktif	65,00%	Kab.Buleleng,	3.843.316.000	3.843.316.000	-	-
T O T A L											17.783.900.662,00	19.874.810.518,36	2.090.909.856,36	-